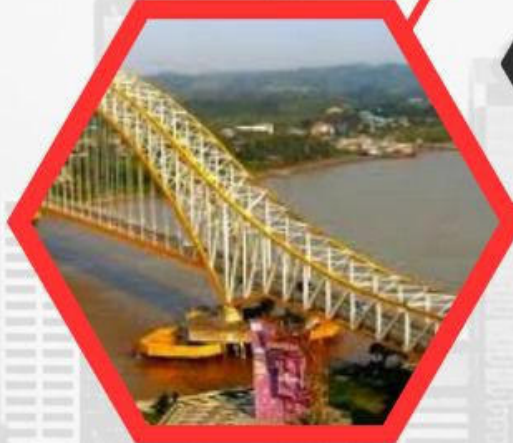


RANHIR RENJA TAHUN 2025



**BRIDA
KUKAR**



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P-245/SK/-BRIDA/P1.1/818.1/7/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
EVALUASI KINERJA PERUBAHAN DAN RANHIR 2025 PERANGKAT DAERAH SUB
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu Penetapan Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja 2025, Rancangan Rencana Kerja 2025, Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja 2025, Rancangan Rencana Kerja Perubahan 2024, dan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Perubahan 2024 Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
 - pegawai yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas
 - b. dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas,
 - dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 6. tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan 2023;
10. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36/SK-BUP/HK tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana awal terkait pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- b. Mengarahkan, Mengkoordinasikan terkait Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
- c. Mengumpulkan dan Menghimpun Bahan terkait Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- d. Menyusun Dokumen Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja 2024, Rancangan Rencana Kerja 2024, Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja 2024, Rancangan Rencana Kerja Perubahan 2024, dan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Perubahan 2024 Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Mengevaluasi serta mengentri data Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- f. Membuat laporan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.

Adapun Susunan Personalia Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Ditetapkan di : Tenggara
Pada Tanggal : 31 Juli 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara di-Tenggarong
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
4. Yang bersangkutan





KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun ke 4 pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra OPD BRIDA yang sebelumnya bernama Balitbangda Tahun 2021-2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) merupakan dokumen rencana kerja untuk periode 1 (Satu) tahun yang berisi informasi dan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Penutup yang menggambarkan Rencana Kerja berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Tenggarong, Agustus 2024



**DAFTAR ISI**

Halaman Judul	i
Surat Keputusan Kepala Balitbangda Kab Kutai Kartanegara.....	ii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
4.1 Program dan Kegiatan.....	47
BAB IV PENUTUP	67



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau Hipotesis di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pengembangan adalah Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan memanfaatkan Kaidah dan teori Ilmu Pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi Ilmu Pengetahuan yang telah ada.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2010 Tentang Komite Inovasi Nasional bahwa mengamanatkan kebijakan inovasi nasional di Indonesia perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan system inovasi nasional guna meningkatkan produktifitas nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sesuai Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Litbang daerah di arahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama dibidang peneltian dan pengembangan guna membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan/regulasi, penyelenggaraan inovasi daerah, pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Inovasi adalah kegiatan peneltian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengtahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.



Pasal 386 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat berasal dari Kepala Daerah, Anggota DPRD Kabupaten, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat. Kemudian di Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 menyatakan bahwa Bripda sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan Pelaksanaan Inovasi.

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, dan Masyarakat di Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah menjabarkan Visi dan Misi serta arah Pembangunan pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja (Renja) -PD Badan Riset dan Inovasi Daerah ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Selama 5 Tahun 2021-2026. Untuk mengantisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil Penelitian / Kajian.



Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi dan misi,

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik dan dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagai mana telah ubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/36/SJ Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
27. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-370/BAPP-V.1/065.II/02/2022 Tentang Pedoman Penyusunan (Renja-PD) Tahun 2023.



1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026.

b. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

- a. Mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara kedalam Rencana Kegiatan Pembangunan melalui Kutai Kartanegara IDAMAN.
- b. Sebagai acuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Kartanegara sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misinya.
- c. Merumuskan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2025.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Tahun 2023 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2024 (n), sehingga realisasi capaian target Renja masih sebatas perkiraan. Evaluasi realisasi capaian target Renja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra PD (n-1 dan n-2), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan kerja yang telah direncanakan; Sehingga PD dapat mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, selain itu juga dapat mengetahui program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

A. Realisasi program/kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kendala kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator masukan (input), Keluaran (output) dan hasil (outcome). Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Sebagai gambaran capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan Brida Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pagu Anggaran BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 sebesar Rp. 14.773.174.485,- dan mengalami kenaikan pada anggaran perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 18.291.226.889,- dan menjadi sebesar Rp. 33.064.401.374,- Adapun Realisasi keuangan program/kegiatan Brida Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 30.422.355.033 (92.33 %) dan Realisasi Fisik (100 %).

Secara umum capaian kinerja program/kegiatan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 hingga penyusunan dokumen Renja PD Tahun



2025 ini berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Uraian Sub Kegiatan		19.463.801.374,-	17.618.079.528,-	90.52	100
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270.000.000,-	250.793.460,-	92.89	100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.603.651.091,-	7.515.826.299,-	87.36	100
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	90.000.000,-	87.740.759,-	97.49	100
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	905.000.000,-	653.216.773,-	72.18	100
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.588.205.712,-	6.316.585.502,-	95.88	100
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.989.000.000,-	1.915.455.000,-	96.30	100
7	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	847.944.571,-	725.213.793,-	85.53	100
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	170.000.000,-	153.247.942,-	90.15	100

b. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Uraian Sub Kegiatan		13.600.600.000,-	12.804.275.505,-	94.14	100
1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.422.230.000,-	5.315.384.311,-	98.03	100
2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kemasyarakatan	1.965.000.000,-	1.879.176.707,-	95.63	100
3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan	3.432.640.000,-	3.052.893.311,-	88.94	100
4	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi	2.780.730.000,-	2.556.821.176,-	91.95	100



B. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum target kinerja pada tahun anggaran 2023 tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan walaupun terdapat kendala pada proses pelaksanaan kegiatan belanja langsung pada Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mengakibatkan target waktu yang telah ditetapkan selama 6 bulan tidak sesuai lagi, maka akhirnya seluruh kegiatan berakhir pada bulan Desember 2023.

C. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra Brida tahun 2021 – 2026 maka pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan target 100 % (Realisasi Fisik) dan 92.01 % (Realisasi Keuangan).

Berdasarkan target capaian program pada Renstra tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 secara umum telah memenuhi target capaian program pada Renstra Brida Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja program / kegiatan adalah pengalokasian anggaran kegiatan harus melihat kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan selama satu tahun dalam tahun perencanaan (n-1).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024) maka dibuat tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD tahun 2021 – 2026 (Tabel Terlampir Tabel T-C. 29).



Tabel TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan
Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
								Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	95	62.65	84	90.45	108%	87 (A)	90.45	95%
5	05	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55	22	11	11	100%	11	44	80%
5	05	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	4	2	2	100%	2	8	80%



5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	16	8	8	100%	8	32	80%
5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	2	1	1	100%	1	4	80%
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	35	14	7	7	100%	7	28	80%
5	05	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5450	2092	1090	1002	92%	1090	4184	77%
5	05	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran Triwulan / Laporan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	30	12	6	6	100%	6	24	80%
5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	35	14	7	7	100%	7	28	80%
5	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30	12	6	6	100%	6	24	80%
5	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	5	2	1	1	100%	1	4	80%
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	30	12	6	6	100%	6	24	80%



2	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	32	10	4	40%	10	46	92%
2	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	10	5	5	100%	5	20	80%
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan administrasi umum	35	14	7	7	100%	7	28	80%
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75	30	2	2	100%	31	63	84%
5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55	32	2	2	100%	11	45	82%
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	8	3	3	100%	4	15	94%
5	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	0	2	2	100%	2	4	40%
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2145	849	429	420	98%	256	1525	71%
5	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	185	74	37	37	100%	37	148	80%
5	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	2	1	1	100%	1	4	80%
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	24	12	12	100%	12	48	80%



5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	96	48	48	100%	48	192	80%
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1920	768	384	384	100%	384	1536	80%
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1215	487	243	243	100%	243	973	80%
5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160	58	31	26	84%	31	115	72%
5	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1060	424	212	212	100%	212	848	80%
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	100	100	100	100%	100	100	100



5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	7	13	28	28	100%	16	57	814%
5	05	02	2.01	01	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	3				3	300%
5	05	02	2.01	02	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	6	3	100%	3	12	1200%
5	05	02	2.01	03	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	1		1	100%	2	3	300%
5	05	02	2.01	04	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	3				3	300%
5	05	02	2.01	05	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	0		3	100%	3	6	600%



5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1									0%
5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian tentang pengembangan bidang badan usaha milik desa	1	1								100%
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola dengan baik	0	2	2	100%	2					400%
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	0	1	1	100%						100%
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1		18	100%	6					2400%
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan yang Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	100	100	100	100%	100	100	100	100	100	100%



5	05	02	2.02		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	10	11	7	7	100%	13	31	310%
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	1				1	2	200%
5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0		2	2	100%	1	3	300%
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	1	1	1	1		2	4	400%
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1		1	1		1	2	200%
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0					1	1	100%
5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1					1	1	100%
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	5	9	3	3	100%	6	18	360%
5	05	02	2.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1							0%



5	05	02															
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5	4	9	9	100%	1	14	280%				
5	05	02	2.03	01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	1	1	100%	2	4	400%				
5	05	02	2.03	02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	1	1	1	100%	1	3	300%				
5	05	02	2.03	03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1		1	1	100%		1	100%				
5	05	02	2.03	04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	2	4	4	100%	7	13	1300%				
5	05	02	2.03	05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1					3	3	300%				
5	05	02	2.03	07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0		1	1	100%		1	100%				



5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0		1	1	100%	1	100%
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1					0	0%
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	100	100	100	100	100%	100	100%
5	05	02	2.04		Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	5	2	6	6	100%	18	360%
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1		3	3	100%	9	900%
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1						0%
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	2	1	1	100%	5	500%
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	1	1	100%	3	300%



5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	1	1	1	100%	1	3	300%
---	----	----	------	----	-------------------------------------	--	---	---	---	---	------	---	---	------



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyusunan Renstra PD mengacu pada Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renstra PD diatur dengan Peraturan penyusunan Renstra Brista ini berpedoman pada Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kutai Kartanegara 2005-2025 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang RPJMD Tahun 2015-2019. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebijakan Pembangunan Nasional.

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai organisasi perangkat daerah dengan tolak ukur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di tahun ke 3 (Tiga) Renstra Tahun 2021-2026 mempunyai dua sasaran (sasaran utama dan sasaran pendukung) dan indikator yaitu :

- a. Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan inovasi daerah.
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2023. Keberhasilan pencapaian sasaran akan diketahui berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan sasaran telah terlaksana.

Adapun sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Badan Riset dan Inovasi Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan inovasi daerah dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah.
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Brista.

Dua sasaran dan indikator tersebut telah dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang dihasilkan Tahun ke 5 (lima) Renstra Tahun 2021-2026 sebagai berikut (Tabel Terlampir Tabel T-C. 30).



Tabel TC - 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			
1	Persentase Rekomendasi yang termanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan daerah			28.6	33.4	100	100	100	28.6	33.3	100	100	100			adanya perubahan target pada indikator tujuan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan sudah menjadi kesepakatan bersama dengan Bappeda
2	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
3	Indeks Inovasi Daerah			36.64	41.38	55.85	57	61	41.38	55.85	58.69	60.01	61			adanya perubahan target pada indikator sasaran ke-2 hasil evaluasi tahun sebelumnya dan sudah menjadi kesepakatan bersama dengan Bappeda
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah			81	84	87	91	91	62.65	90.45	90.45	91	91			
5	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen		
6	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan		
7	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen		

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



16	Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan			100	1	100	1	100	100	100	100	100	100	100	
17	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan			1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1
18	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi			2	1	100	1	100	1	100	2	Laporan	6	10	1



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

- A. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD , Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah bahwa Brida merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dibidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Brida menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan di pemerintah daerah
- c. Perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, kerjasama pembangunan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah.
- e. Pelaksanaan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah.
- f. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah.
- g. Penyusunan laporan rutin dan tahunan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah



B. Menentukan permasalahan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan Renja PD, serta capaian kinerja Renstra PD tahun sebelumnya, yaitu :

- 1) Belum optimalnya ASN Brida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- 2) Belum Optimalnya jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi / PD lainnya
- 3) Hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Brida belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh PD dan stakeholder lainnya.
- 4) Pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi tetapi pada umumnya belum maksimal dilaksanakan dalam sistim pengendalian
- 5) Setiap pemangku kegiatan jarang memperkiraan resiko yang akan terjadi apabila pekerjaan tersebut belum atau tidak dikerjakan.
- 6) Pimpinan melalui pertemuan atau pembinaanya melakukan pemantuan dilihat dari keberhasilan atau penyerapan anggaran yang telah dipergunakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- 7) Kurangnya Pemahaman terhadap penerapan SPIP dan Manfaatnya

C. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional/ internasional, SPM dan MDGs.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja utama dan belanja utama Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah akan berdampak kepada Internal maupun eksternal Badan Riset dan Inovasi Daerah , pada analisis risiko terdapat penyebab risiko dan skala risiko sehingga akan menghasilkan area dampak seperti Beban keuangan daerah, Penurunan reputasi, Sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi, Kecelakaan kerja, Ganggugan terhadap layanan organisasi dan Penurunan kinerja, dengan Level dampak seperti tidak signifikan (1), minor (2), moderat (3), signifikan (4), sangat signifikan (5).

Untuk mengetahui level dampak tersebut harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi atas pengendalian intern yang telah dibuat seperti pada Surat Instruksi dan Surat Edaran Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut serta pengendalian yang lain yang mendukung atas evaluasi tersebut.



Dari berbagai opsi penanganan risiko yang telah dipilih memiliki dampak risiko seperti pada surat edaran Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut terdapat area dampak yang harus dilakukan rencana tindak pengendalian yang dibuatkan secara terpisah dari manajemen risiko.

Untuk mencapai tujuan dalam kegiatan dan capaian tujuan organisasi terhadap pemenuhan target yang diperjanjikan perlu dikomunikasi dan dikonsultasikan antar kegiatan dan pimpinan, komunikasi dan konsultasi tersebut dapat berupa :

1. Rapat berkala ;
2. Rapat insidental ;
3. Focused group discussion ; dan
4. Forum pengelola risiko.
5. Pelaksanaan Pra seminar Hasil dan Seminar Hasil

D. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah :

1. *Good governance* yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan dan implementasikan kepada wujud pelaksanaan yang lebih nyata dan bertanggungjawab;
2. Tuntutan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih 2021-2026 yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026;
3. Tuntutan *stakeholders* terhadap publikasi hasil litbang;
4. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal;
5. Hasil-hasil / *outcome* penelitian yang belum diimplementasikan oleh PD yang ada;
6. Belum tersedianya laboratorium iptek dan riset litbang daerah;

E. Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah :

1. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
2. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan peningkatan Standar Pelayanan Minimal khususnya dibidang kelitbangan daerah.
3. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan peningkatan pelayanan pemerintah daerah.

F. Formulasi Isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.



- 1) **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
- 2) **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan**
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
- 3) **Penelitian dan Pengembangan di Sub. Bidang Ekonomi Pembangunan**
Penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- 4) **Pengembangan Inovasi dan Teknologi**
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal dan Renstra PD pada Tahun 2025

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan PD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel; sehingga aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan salah satu PD yang berperan strategis dalam pemberian rekomendasi terhadap pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan Kutai Kartanegara dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa dan kecamatan juga mengalami perubahan yang nyata.

Akselerasi transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah membutuhkan sinergitas antara semua PD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik alokasi anggaran untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya.



Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melihat Badan Riset dan Inovasi Daerah secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada (Tabel TC. 31 terlampir pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah).



Tabel TC. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Riset dan Inovasi Daerah						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Rancangan Awal RKPD					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	93 Nilai	11.924,800,317	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	93 Nilai	13.857,717,695	
1.1	Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	270,000,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	750,000,000	
						PENYELENGGARAN WALIDATA PENDUKUNG SEKTORAL DAERAH		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	50,000,000	Tambahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000,000	Tambahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/ Semester SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Bulan / Triwulan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulan / Triwulan / Semester SKPD	6	Laporan	146,790,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/ Semester SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan n/Semester SKPD	6 Laporan	146,790,000		
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000		Tambahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	7	Dokumen	90,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	105,000,000		
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000		Tambahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD



								Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000,000	Tambahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida			6	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	50,000,000	Brida	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30,000,000	
1.3.2	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Brida			1	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	40,000,000	Brida	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	Pengurangan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Brida			6	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	155,000,000	Brida	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	155,000,000	
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Brida			10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	95,000,000	Brida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	95,000,000	
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida			5	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	60,000,000	Brida	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	5 Orang	60,000,000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Brida			7	Jumlah Pelayanan administrasi umum	Pelayanan	576,647,962	Brida	Jumlah Pelayanan administrasi umum	7 Pelayanan	576,647,962	



1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Brida	Jumlah Paket Peralatan dan Kantor yang Disediakan	3	Paket	135,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Brida	Jumlah Paket Peralatan dan Kantor yang Disediakan	3 Paket	135,000,000	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Brida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	124,450,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Brida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	124,450,000	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Brida	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	30,002,325	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Brida	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30,002,325	
1.5.4	Penyediaan Bahan/Material	Brida	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	45,883,637	Penyediaan Bahan/Material	Brida	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	45,883,637	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	Laporan	149,992,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	149,992,000	
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37	Dokumen	61,320,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37 Dokumen	61,320,000	
1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	30,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Brida	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	Unit	65,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Brida	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	-	Pengurangan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	212	Unit	70,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	212 Unit	70,000,000	
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial dan Kependudukan 3. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi	100	Persen	Rp 1,490,000,000.00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kab. Kukar	1. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial dan Kependudukan 3. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi	100 Persen	Rp 7,155,000,000.00	



2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	Dok	125,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	8 Dokumen	1,050,000,000	
							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 laporan	150,000,000	Tambahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
2.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	1	Lap	125,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	1 laporan	250,000,000	
							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 laporan	150,000,000	Tambahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 laporan	150,000,000	Tambahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD



									Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Dokumen	100,000,000	Tambahkan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
									Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	200,000,000	Tambahkan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
									Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	50,000,000	Tambahkan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
2.2	penelitian dan pengembangan daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial Dan Kependudukan	5	Dok	1,115,000,000	penelitian dan pengembangan daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegara		Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial Dan Kependudukan	7 Dokumen	1,475,000,000			
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen		150,000,000	Tambahkan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD		
							Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen		750,000,000	Tambahkan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD		
2.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Dok	115,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen		75,000,000			



2.2.2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	4	Dok	1,000,000,000	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	4 Dokumen	500,000,000	
2.3	penelitian dan pengembangan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	Dok	125,000,000	penelitian dan pengembangan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	6 Dokumen	1,025,000,000	
							Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	300,000,000	Tambahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
2.3.1	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	Dok	125,000,000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	625,000,000	
							Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	100,000,000	Tambahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
2.4	penelitian dan pengembangan daerah bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	1	Dok	125,000,000	penelitian dan pengembangan daerah bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	13 Dokumen	3,605,000,000	
							Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	400,000,000	Tambahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja.

Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun PD di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi serta isu-isu aktual dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perda No 1 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah didiskusikan dalam pembahasan Forum PD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Dari hasil Musrenbang tersebut belum ada usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. (Tabel terlampir pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah).

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1							Belum ada usulan untuk kegiatan dari hasil Musrenbang yang dilaksanakan.
2							



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agar tercapainya sinergitas kegiatan Kelitbangan serta *outcome* yang luas, maka penyusunan rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara tetap memperhatikan rencana strategis Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai ujung tombak pengembangan dunia Kelitbangan di tanah air serta tetap memperhatikan rencana strategis Provinsi Kalimantan Timur maupun rencana strategis Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam upaya peningkatan pembangunan iptek nasional dan perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting karena akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya dalam menentukan Kebijakan yang akan diambil Pemerintah Daerah.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2020-2024, maka pembangunan iptek ke depan harus diarahkan kepada Meningkatnya Produktivitas Inovasi dan Inovasi untuk memperkuat Transformasi Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan serta meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka Reformasi Birokrasi sesuai Sasaran Strategis. Kemampuan Iptek dan Inovasi dimaknai oleh Keahlian Sumber Daya Manusia dan Lembaga Litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (Kelembagaan, sumber daya dan jaringan).

Adapun untuk memaknai daya saing bangsa adalah kontribusi Iptek dan Pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukan oleh keunggulan produk Teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan SDM yang berkarakter unggul dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkanlah misi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menjawab permasalahan pembangunan iptek dengan uraian sebagai berikut :



- a. Peningkatan Kapabilitas IPTEK, Budaya Riset, dan Penciptaan Inovasi melalui peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Penguatan Transformasi Ekonomi, dan Pembangunan berkelanjutan berlandaskan budaya iptek untuk peningkatan daya saing.
- b. Peningkatan Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Selain mendasarkan pada rencana strategis pada Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara juga tetap memperhatikan rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting sebab spektrum kelitbangan di wilayah Kalimantan Timur didorong untuk saling *men-support* dalam mencapai tujuan besar pengembangan daerah di wilayah Kalimantan Timur yaitu sebagai pusat agroindustri dan energi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. VISI MISI

Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara konseptual Visi dan Misi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menjalankan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menunjang Pemerintahan Daerah di bidang Riset dan Inovasi yang mana Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”***.

Dengan mengemban Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai pendukung dalam pelaksanaannya yang mana berkomitmen serta merumuskan hasil akhir Penelitian dan Pengembangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.



Untuk menggambarkan lebih jelas dan mewujudkan Visi yang ingin dicapai serta menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah maka peran Badan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan serta mendukung Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut :

- 1) Memanfaatkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efesien Dan Melayani.
- 2) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berahlak Mulia,Unggul Dan Berbudaya.
- 3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian,Parawisata Dan Ekonomi Kreatif.
- 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah.
- 5) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan 5 (Lima) Misi tersebut di atas, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang merupakan Pelaksana Utama dan Pendukung dalam pencapaian keseluruhan misi tersebut dengan memfokuskan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan seluruh sumber daya organisasi yang tersedia, dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal guna mengemban tugas organisasi yang telah diamanatkan tersebut. Capaian Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut merupakan kontribusi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dalam melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni ***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”***. Dalam upaya mencapai Visi tersebut maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Misi Pemerintah Daerah selama kurun waktu Tahun 2021 – 2026 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut :



- 1) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Pemerintahan Daerah;
- 2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
- 3) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
- 4) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Inovasi Daerah;
- 5) Melaksanakan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan
- 6) Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keuangan Perangkat Daerah
- 7) Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Administrasi Aparatur Umum.

b. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan Tujuan dan Sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan yang diharapkan dapat mengetahui kelebihan / kekuatan yang dimiliki untuk melaksanakan aktivitas dan tidak melakukan suatu kegiatan yang mempunyai kekurangan / kelemahan.

Hal ini dimaksudkan agar Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) mampu mencapai tujuan dan sasarannya, sehingga tidak ada satu sasaran pun atau aktivitas yang tertunda atau tidak tercapai. Perumusan tujuan yang ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) diupayakan untuk mengikuti kriteria keberhasilan perumusan yaitu :

- 1) Aksestabilitas, yang berarti tujuan dapat diterima oleh berbagai pihak dalam lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
- 2) Fleksibilitas, yakni mudah untuk disesuaikan dengan perubahan yang begitu cepat.
- 3) Dapat diukur, yaitu berarti tujuan dapat dinyatakan secara nyata dan jelas.
- 4) Motivator, sebagai pendorong bagi kinerja yang terpenuhi yang berarti tujuan cukup jelas namun masih dalam batasan untuk dapat dicapai.



- 5) Kesesuaian dengan rumusan Visi dan Misi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
- 6) Mudah dipahami.

Berdasarkan kriteria diatas, ditetapkan tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah”

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah ***“Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah”*** dengan strategi dan arah kebijakan yang di lakukan sebagai berikut :

Strategi :

- 1) Melaksanakan Kajian dan Penelitian yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah
- 2) Optimalisasi Kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah

Arah Kebijakan :

- 3) Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- 4) Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- 5) Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 6) Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi
- 7) Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
- 8) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
- 9) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) merupakan bagian konsep berkesinambungan (integral), tak terpisahkan dari suatu proses perencanaan



strategik. Sasaran fokusnya pada *action*, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dapat diwujudkan dengan gambaran sebagai berikut :

VISI (RPJMD)	:	"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"		
MISI (RPJMD)*	:	1)Memfaatkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efesien Dan Melayani		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah	Melaksanakan Kajian dan Penelitian yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			Optimalisasi Kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
				Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi
				Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
				Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
				Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah



4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah –kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi, Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara yaitu Program Kegiatan Pembangunan melalui Kutai Kartanegara Inovatif, Daya Saing, dan Mandiri (IDAMAN), RPJMD, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam menyusun program dan kegiatan Brida Tahun 2025 tetap memperhatikan upaya – upaya Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan inovasi daerah dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah Serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Brida.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 21.012.717.695,- adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dengan Pagu indikatif sebesar Rp. 13.857.717.695,-.
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 750.000.000,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 10.978.510.858,-
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 105.000.000,-
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 155.000.000,-
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 576.647.962,-
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pagu dana indikatif sebesar Rp 287.750.000,-



- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 684.808.875,-
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 320.000.000,-
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan dengan Pagu indikatif sebesar Rp. 7.155.000.000,-.
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 1.050.000.000,-
 - b. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 1.475.000.000,-
 - c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Pagu dana indikatif sebesar Rp 1.025.000.000,-
 - d. Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi.
Pagu dana indikatif sebesar Rp 3.605.000.000,-

(Terlampir Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 pada Tabel T-C. 33)



Tabel TC. 33

Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Brida	93 NILAI	13.857,717,695	APBD		95 NILAI	11,884,800,317
5	05	01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	7 Dokumen	750,000,000	APBD		7 Dokumen	270,000,000
			PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Brida	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	-
			PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Brida	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	-



5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	3	Dokumen	450,000,000	APBD	3	Dokumen	100,000,000
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	1	Laporan	50,000,000	APBD	1	Laporan	100,000,000
5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	1	Laporan	150,000,000	APBD	1	Laporan	70,000,000
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Brida	7	Laporan	10,978,510.858	APBD	7	Laporan	10,013,343,480
5	05	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	76	Orang / Bulan	10,781,720.858	APBD	76	Orang / Bulan	9,866,553,480
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Brida	1	Laporan	25,000,000	APBD	0	Dokumen	-
5	05	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Brida	6	Laporan	146,790,000	APBD	6	Laporan	146,790,000
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Brida	0	Dokumen	25,000,000	APBD	0	Laporan	-



5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Brida	4	Dokumen	105,000,000	APBD	7	Dokumen	50,000,000
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	1	Dokumen	25,000,000	APBD	0	Dokumen	-
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Brida	1	Laporan	50,000,000	APBD	0	Laporan	-
5	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	2	Laporan	30,000,000	APBD	6	Laporan	50,000,000
5	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	0	Laporan	-	APBD	1	Laporan	-
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Brida	6	Dokumen	155,000,000	APBD	6	Dokumen	155,000,000
2	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Brida	10	Orang	95,000,000	APBD	10	Orang	95,000,000
2	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	5	Orang	60,000,000	APBD	5	Orang	60,000,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Brida	1	Unit	287,750,000	APBD			287,750,000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Brida	1	Paket	287,750,000				287,750,000



5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan administrasi umum	Brida	7	Pelayanan	APBD		7	Pelayanan	576,647,962	576,647,962
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Brida	3	Paket	APBD		3	Paket	135,000,000	135,000,000
5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Brida	2	Paket	APBD		2	Paket	124,450,000	124,450,000
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Brida	2	Paket	APBD		2	Paket	30,002,325	30,002,325
5	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Brida	2	Paket	APBD		2	Paket	45,883,637	45,883,637
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	88	Laporan	APBD		88	Laporan	149,992,000	149,992,000
5	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	37	Dokumen	APBD		37	Dokumen	61,320,000	61,320,000
5	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Brida	1	Dokumen	APBD		1	Dokumen	30,000,000	30,000,000
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Brida	12	Bulan	APBD		12	Bulan	684,808,875	684,808,875
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Brida	12	Laporan	APBD		12	Laporan	58,915,728	58,915,728
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Brida	12	Laporan	APBD		12	Laporan	625,893,147	625,893,147



5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Brida	242	Unit	320,000,000	APBD	242	Unit	135,000,000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Brida	30	Unit	250,000,000	APBD	30	Unit	-
5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Brida	0	Unit	-	APBD	31	Unit	65,000,000
5	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Brida	212	Unit	70,000,000	APBD	212	Unit	70,000,000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan 3. Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	100	Persen	Rp 7,155,000,000.00	APBD	100	Persen	Rp 1,490,000,000.00



5	05	02	2.01	Pencelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	8	Laporan	1,050,000,000	APBD	1	Dokumen	125,000,000
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	150,000,000	-	-	-
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	250,000,000	-	-	-
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	150,000,000	-	-	-
5	05	02	2.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	150,000,000	-	-	-
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Dokumen	100,000,000	-	-	-



					Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Rekomendasi	200,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	50,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.02		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegara	7	Dokumen	1,475,000,000	APBD		2	Dokumen	1,115,000,000
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	150,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	750,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	75,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	4	Dokumen	500,000,000	APBD		1	Dokumen	1,000,000,000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	6	Dokumen	1,025,000,000	APBD		1	Dokumen	125,000,000



5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Dokumen	300,000,000	APBD	-	-	-
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	3	Dokumen	625,000,000	APBD	-	-	-
	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	100,000,000	APBD	-	-	-
5	05	02	2.04		Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	13	Dokumen	3,605,000,000	APBD	1	Laporan	125,000,000
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Dokumen	400,000,000	APBD	-	-	-
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Laporan	1,800,000,000	APBD	-	-	-
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Kutai Kartanegara	4	Laporan	875,000,000	APBD	-	-	-



5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	3	Laporan	230,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Laporan	300,000,000	APBD		1	Laporan	125,000,000
Total Page											Rp 21,012,717,695	APBD			Rp 13,374,800,317



c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Rumusan Program dan Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 masih menggunakan formulasi awal namun ada penambahan berdasarkan analisis kebutuhan yang masih sesuai dengan Renstra tahun 2021 – 2026. Sehingga terdapat perubahan pada hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Brida Tahun 2025.

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Sebagai mana Format Tabel Berikut :

No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	93 Nilai	13,857,717,695
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	750,000,000
1.1.1	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Brida	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50,000,000
1.1.2	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Brida	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000
1.1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450,000,000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50,000,000
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150,000,000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	7 Dokumen	10,978,510,858
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang / Bulan	10,781,720,858



1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	146,790,000
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Brida	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	105,000,000
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Brida	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50,000,000
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30,000,000
1.3.3	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	155,000,000
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Brida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	95,000,000
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	60,000,000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Pelayanan administrasi umum	7 Pelayanan	576,647,962
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Brida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	135,000,000
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Brida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	124,450,000
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Brida	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30,002,325
1.5.4	Penyediaan Bahan/Material	Brida	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	45,883,637
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	149,992,000
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37 Dokumen	61,320,000
1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30,000,000



	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Brida	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	287,750,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	287,750,000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Pelaporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	684,808,875
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58,915,728
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	625,893,147
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	243 Unit	320,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Brida	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	250,000,000
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Brida	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	-
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212 Unit	70,000,000
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial dan Kependudukan 3. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi	100 Persen	Rp 7,155,000,000.00
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	8 Dokumen	1,050,000,000
2.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	150,000,000
2.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	1 Laporan	250,000,000



2.1.3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	150,000,000
2.1.4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 Laporan	150,000,000
2.1.5	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Dokumen	100,000,000
2.1.6	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Laporan	200,000,000
2.1.7	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	50,000,000
2.2	penelitian dan pengembangan daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	7 Dokumen	1,475,000,000
2.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	1 Dokumen	150,000,000
2.2.2	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	750,000,000
2.2.3	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	75,000,000
2.2.4	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	4 Dokumen	500,000,000
2.3	penelitian dan pengembangan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	6 Dokumen	1,025,000,000
2.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	300,000,000
2.3.2	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	625,000,000
2.3.3	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	100,000,000
2.4	penelitian dan pengembangan daerah bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	13 Dokumen	3,605,000,000
2.4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	400,000,000
2.4.2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	1,800,000,000



2.4.3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	875,000,000
2.4.4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	230,000,000
2.4.5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan	300,000,000
				Total	21,012,717,695

**BAB V P E N U T U P**

Rencana Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Adapun proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, maka dengan beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan dibutuhkan dalam kurun waktu selama 6 bulan mulai dari penyusunan pengelola administrasi kegiatan sampai dengan laporan akhir kegiatan. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka kegiatan kelitbangan akan mengambil kegiatan yang sangat prioritas dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Bripda.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dibutuhkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Judul kegiatan berdasarkan Indea konsep paper (ICP)
2. Dilanjutkan dengan Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan.
3. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran.
4. Pembuatan Dokumen Perencanaan Anggaran.
5. Pembuatan SK Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
6. Pembuatan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
7. Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan.
8. Penunjukan Tenaga Peneliti.
9. Pengajuan Proposal.
10. Kesepakatan Kerjasama Kegiatan.
11. Pelaksanaan Kegiatan (Pengambilan Data, Pembuatan Draf Laporan Hasil, Laporan Hasil, Pra Seminar Dan Seminar, Laporan Akhir).
12. Penyampaian Rekomendasi Ke Pemangku Kepentingan.



c. Rencana tindak lanjut

Adapun langkah tindak lanjut yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai Berikut :

1. Menampilkan usulan Program dan Kegiatan serta sub Kegiatan yang bersumber dari Pengampu Kepentingan;
2. Memperbaiki uraian-uraian dan tata naskah yang belum sesuai substansi Renja 2023 antara lain, memperbaiki Landasan Hukum Peraturan Perundangan yang telah tidak sesuai;
3. Membuat Surat Keputusan (SK) Kepala Brida tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.
4. Menyesuaikan Sub Kegiatan yang tidak ada anggaran dengan cara mengosongkan Matrik Pada TC. 29, TC 30, TC 31 dan TC 33.
5. Menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Brida dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026;
6. Menyesuaikan Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Brida Kutai Kartanegara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perangkat Daerah;
7. Uraian Objek Sub Kegiatan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD diprioritaskan pada nilai atau skor Indeks yang datanya bukan bersumber dari Kementerian;
8. Mengusulkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID) masuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Melakukan Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pemangku Kinerja dalam melakukan Kajian, Penelitian, Fasility Study agar hasilnya benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan;

Rencana Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh disiplin, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara



merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) tahun anggaran 2025, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melimpahkan Rahmat dan Berkah buat kita semua.

Tenggarong, Agustus 2024



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**